

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara anggota GCC, Qatar, merupakan negara dengan sistem Keamiran. Dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Emir dan pewaris yang ditunjuk.¹ Dalam praktik kenegaraannya Qatar tetap menghargai dengan adanya konstitusi. Dalam menjalankan kewajibannya, seorang Emir dibantu oleh beberapa lembaga negara yang dipilih langsung oleh Emir dan juga terpilih melalui pemilihan umum. Beberapa lembaga terpenting yaitu *advisory council* dimana dua pertiga anggota bagian dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan yang bertugas menentukan program-program dan mengira-ngira kerja mereka yaitu *central municipal council*. Anggotanya merupakan hasil dari pemilihan umum selama 4 tahun sekali. Tugas dari *central municipal council* lainnya yaitu memberikan usulan kepada *ministry*, memantau pelaksanaan undang-undang berkenaan keputusan dan peraturan yang berkaitan dengan perkotaan, industri, infrastruktur, serta sistem publik lainnya, dan mengawasi pengelolaan ekonomi, keuangan dan administrasi.

Arah politik luar negeri Qatar adalah realisme dan *soft power*. Mereka menjalin kerjasama dengan negara dunia dengan ‘memandang’ keuntungan mutlak bagi mereka. Dan mendirikan media massa pada tahun 1996. Berbasis di ibukota Qatar, Doha, bernama Al Jazeera. Memberitakan maupun menyebarkan isu-isu yang berbasis regional hingga internasional. Al Jazeera dijadikan senjata utama Qatar dalam memobilisasi diplomasi *soft power* Qatar. Secara geopolitik, negara ini berbatasan dengan Teluk Persia di bagian utara, timur, dan barat, serta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di bagian selatan.²

¹ Repositor UMY, Bab III Dinamika Sosial Politik Qatar

² Repository UMY, Bab III Dinamika Sosial Politik Qatar

GCC sendiri merupakan kepanjangan dari *Gulf Cooperation Council* atau Dewan Kerjasama Teluk adalah aliansi 6 negara teluk kawasan jazirah Arab. Dibentuk pada tahun 1981, terdiri dari 6 negara anggota yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bertujuan mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan sosial antara 6 negara anggota dan mengadakan pertemuan puncak setiap tahun untuk membahas kerjasama dan urusan regional (Moslem Today, 2017).

Memanasnya hubungan antara Qatar dan 4 negara anggota GCC, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir pada tahun 2017 dikenal sebagai krisis diplomasi Qatar atau lebih sering disebut sebagai *Qatar Crisis* oleh media-media barat. Krisis ini ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik keempat negara Arab dengan Qatar, dilanjutkan dengan pemutusan hubungan perdagangan, dan blokade jalur darat, laut, dan udara dari dan menuju Qatar melalui wilayah teritori keempat negara (Al Jazeera, 2020).

Pemutusan hubungan ini dijustifikasi sebagai bentuk hukuman dan sanksi dari koalisi keempat negara terhadap Qatar yang dituduh mendukung gerakan terorisme. Qatar juga dicurigai menjalin hubungan kerjasama dengan Iran untuk mengacaukan dan mencampuri urusan dalam negeri keempat negara. Tindakan Qatar ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran perjanjian kesepahaman anggota GCC, dimana Qatar dan keempat negara termasuk kedalam anggotanya.

Adapun poin-poin dalam perjanjian tersebut yang dilanggar oleh Qatar menurut koalisi keempat negara adalah:

1. Menyetujui kebijakan non-interferensi, yakni kebijakan yang melarang setiap negara anggota GCC untuk mencampuri urusan dalam negeri negara anggota GCC lain dalam situasi apapun, secara langsung maupun tidak langsung
2. Menyetujui kebijakan non-suportif, atau kebijakan untuk tidak memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pihak organisasi maupun individu, yang mengancam keamanan dan stabilitas negara anggota GCC, baik dalam bentuk tindakan dukungan secara langsung, melalui pengaruh politik, maupun dukungan melalui media-media massa (BBC News Arabic, 2014).

Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin (IM) dianggap telah melanggar kebijakan non-suportif karena Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang dianggap sebagai penyebab kudeta di Mesir, dan kekacauan-kekacauan lain di negara-negara Arab (*Arab Springs*). Sedangkan pengeratan hubungan antara Qatar dan Iran, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebijakan non-interferensi karena dicurigai sebagai langkah untuk mempenetrasi urusan dalam negeri keempat negara.

Krisis ini semakin diperparah dengan kejadian peretasan website kantor berita nasional Qatar. Pada tanggal 23 Mei 2017, sebuah tulisan yang berisi kutipan pernyataan Emir Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani yang menyerukan untuk tidak mengkonfrontasi Iran, dan membela kelompok militan Palestina Hamas, serta mendukung Hizbullah, sebuah gerakan Syiah militan yang memiliki koneksi dengan Teheran (Browning, 2017). Meskipun pihak Qatar telah merilis pernyataan resmi terkait peretasan tersebut, dan mengkonfirmasi bahwa pernyataan yang tertulis pada website tersebut bukanlah pernyataan yang dikeluarkan oleh Emir Tamim bin Hamad al-Thani, keempat negara tetap mengambil sikap untuk menutup semua kantor berita Qatar di negaranya, serta mencabut dan melarang penyiaran semua siaran televisi yang berasal dari Qatar.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi menjadi negara pertama yang memutuskan hubungan diplomasi dengan Qatar, menandai awal krisis Qatar, kemudian diikuti oleh 3 negara lainnya. Keempat negara memberi peringatan keras kepada Qatar untuk menutup kantor-kantor diplomasinya di negara mereka dan menghentikan semua kegiatan diplomasinya. Para diplomat dari tiap keempat negara juga ditarik dari Qatar.

Keempat negara juga memutus hubungan perdagangan dengan Qatar, menutup semua akses wilayah air, udara, dan darat dari dan menuju Qatar. Semua maskapai penerbangan udara milik Qatar dilarang untuk menjalankan rute dari dan menuju keempat negara. Semua kapal *vessel* maupun kapal penumpang dan kapal nelayan yang berlayar di bawah bendera Qatar dilarang berlabuh dan dilarang melalui wilayah teritorial laut Uni Emirat Arab. Akses jalur

darat satu-satunya yang dapat dilalui untuk keluar dari wilayah Qatar melalui Arab Saudi juga ditutup.

Isolasi wilayah yang dikenakan kepada Qatar ini menjadi sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa pemenuhan logistik Qatar berasal dari impor laut dan darat. Sementara di lain sisi, pendapatan terbesarnya berasal dari kegiatan perdagangan ekspor minyak yang mengandalkan jalur laut juga sama terancamnya. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri Qatar, menyebabkan warga Qatar untuk menimbun stok makanan, dan menyebabkan harga di pasar saham turun hingga 10%, atau kerugian sebesar \$15 Miliar (BBC, 2017).

Arab Saudi, di antara negara-negara lain yang turut memutus hubungan diplomasi dengan Qatar, menjadi negara yang paling vokal dalam menuntut Qatar untuk mengubah kebijakan politiknya yang dianggap merugikan negara-negara lain di Semenanjung Arab. Awwad Alawwad, Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi menegaskan bahwa kebijakan Qatar yang mendukung dan melindungi para tokoh pelaku terorisme melalui bantuan finansial dan logistik harus dihentikan. Arab Saudi juga merilis daftar panjang nama tokoh teroris buron yang dilindungi oleh Qatar, dan menuntut Qatar untuk segera menyerahkan 59 individu dan 12 entitas yang bersembunyi di Qatar (Hatoum, 2017).

Alawwad mengatakan bahwa sikap Qatar terlalu pragmatis dan hipokrit, bahwa “Pemerintah Qatar sudah terlalu lama mengikuti kebijakan yang mendukung organisasi terorisme yang memiliki objektif yang sama dengan mereka, yaitu untuk melakukan destabilisasi negara-negara di wilayah ini (Semenanjung Arab), padahal di waktu yang sama mereka berjanji untuk turut memusnahkan entitas itu (organisasi teroris)” (*Ibid*). Dia menambahkan bahwa selain memberikan perlindungan ketat kepada para pemimpin dan tokoh organisasi teroris, Doha juga memanfaatkan outlet media yang mereka miliki, termasuk Al Jazeera TV sebagai “*mouthpiece of propaganda*” dari tokoh-tokoh tersebut.

Dalam pemboikotan dan pemutusan hubungan diplomasi terhadap Qatar, Arab Saudi yang bertindak sebagai pimpinan koalisi diketahui memiliki hubungan yang kurang baik dengan Qatar. Sebagai negara yang sama-sama bersekutu dengan Amerika Serikat, kedua

negara memang menghindari konfrontasi secara langsung, namun kedua negara terlihat sering terlibat dalam beberapa perselisihan dan perdebatan sengit.

Namun demikian, tidak membuat Qatar khawatir yang berlebih. Perekonomian Qatar adalah salah satu ekonomi terkaya di dunia berdasarkan pendapatan per kapita atau PDB untuk tahun 2015 dan 2016 (tigapilarnews.com, 2018). Ditopang dengan hasil sumber daya alam berupa gas alam cair dan minyak terbesar ketiga setelah Rusia dan Iran. Membuat pendapatan per kapita rata-rata negara Qatar lebih dari US\$ 100.000, melampaui Amerika Serikat dan Inggris. Dan membuat Qatar menjadi negara terkaya di negara-negara teluk dalam hal cadangan gas alam cair, dimana dulunya Qatar adalah negara bawahan Arab Saudi.

Berbeda dengan Arab Saudi dan sekutunya di kawasan teluk, Qatar menganggap Iran bukan sebagai ancaman. Bahkan Qatar memiliki hubungan yang cukup erat dengan rivalnya Arab Saudi tersebut. Mereka telah cukup lama berbagi ladang gas alam cair terbesar di dunia, tepatnya di North Dome. Qatar dan Iran pada tahun 2009 juga memiliki hubungan terkait cadangan gas alam cair dengan Rusia. Ketiga negara tersebut merupakan 3 negara yang memiliki cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Tanpa menghiraukan Arab Saudi dan beberapa negara teluk lainnya, Qatar terus melebarkan sayapnya dengan terus menjalin hubungan baik dengan negara penghasil gas alam cair (kumparannews, 2017).

Amerika Serikat memiliki pangkalan udara terbesar di Timur Tengah, bernama Al Udeid, di Qatar (kumparannews, 2017). Sementara itu, Qatar juga mengirimkan dana untuk Rusia. Dilansir oleh *Bloomberg*, Qatar menginvestasikan US\$ 2,7 milyar ke perusahaan minyak yang dikelola oleh pemerintah Rusia. Sekali lagi, Qatar terus mengarahkan kebijakan luar negerinya yang independent tanpa menghiraukan intervensi negara Arab Saudi dan sekutunya di kawasan teluk.

Selain menjalin hubungan erat dengan negara-negara penghasil gas alam terbesar di dunia, Qatar juga menjalin hubungan yang tidak kalah erat dengan Turki. Hubungan bilateral kedua negara terjadi pada sektor perdagangan. Hal demikian membantu Qatar pada segi importir-eksportir barang maupun kebutuhan pangan dalam negeri. Erdogan, selaku presiden Turki mengatakan bahwa mereka tidak akan melupakan solidaritas negara Qatar disaat Turki

terkena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Itulah mengapa Turki siap berada disamping Qatar disaat adanya aksi boikot dan blokade oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir terhadap Qatar di tahun 2017 (indira, 2019).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Qatar mengatasi dampak negatif dari embargo 4 negara anggota GCC tahun 2017?

C. Kerangka Pemikiran

Teori Neorealisme

Teori neorealisme pertama kali diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth N Waltz dengan nama *structural realism*. Istilah neorealisme kemudian dipopulerkan oleh Richard Ashley dalam bukunya "*The Poverty of Neorealism*". Neorealisme, bersama dengan neo-liberalisme menjadi pendekatan yang paling berpengaruh dalam Ilmu Hubungan Internasional kontemporer (Powell, 1994).

Berbeda dengan pandangan kaum realis yang melihat *power* secara keseluruhan sebagai kekuatan militer, kaum neorealis berpendapat bahwa *power* merupakan akumulasi dari seluruh aspek dan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk memaksa dan mengontrol negara lain di dalam tatanan sistem internasional. Kenneth N. Waltz dalam bukunya mengemukakan bahwa "apa yang seharusnya menjadi perhatian suatu negara bukanlah untuk memaksimalkan *power*, melainkan posisinya di dalam sistem internasional" (Waltz, 1979).

Meskipun demikian, secara general, neorealis atau *structural realist* masih memiliki kesamaan dengan realis klasik dalam memandang *power*. Neorealis menurut Waltz, masih melihat *power* sebagai faktor yang paling penting dalam hubungan internasional. *Power* akan membantu suatu negara untuk mencapai posisi yang aman dalam sistem anarki yang berjalan di dunia. Kedua pendekatan ini juga masih sama-sama menempatkan negara sebagai aktor

utama dalam pendekatannya. Setiap penjelasan berbentuk *state-centric*. Keduanya juga memiliki kesamaan norma dalam memandang isu keamanan, kedaulatan, otonomi, dan kepentingan nasional. Apa yang menjadi pembeda kemudian adalah pendekatan realis klasik lebih cenderung kedalam proses mendapatkan *power*, sementara pendekatan neorealis lebih cenderung kedalam proses *power security*, atau *power* sebagai bentuk jaminan keamanan (Truong, 2016).

Power dalam pandangan neorealisme menurut Mearsheimer, dianggap sebagai mekanisme *survival* dari suatu negara dan *survival* adalah alasan utama negara meningkatkan *power* yang dimilikinya³. Lebih lanjut, Mearsheimer menjelaskan bahwa tiap aktor, tiap negara yang terlibat di dalam sistem, baik regional dan internasional, dipaksa untuk membentuk persekutuan dan mengumpulkan kekuatan untuk melindungi dirinya (*Ibid*). Tujuan-tujuan dalam negeri suatu negara tidak akan bisa terpenuhi selama ia tidak bisa mempertahankan otonomi dan wilayah teritorialnya. Maka daripada itu, muncul dan meningkatnya *power* yang dimiliki oleh satu negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain disekitarnya.

Perkembangan dan pertumbuhan hubungan internasional yang semakin kompleks membuat sistem internasional menjadi sangat anarki (Andrianto, 2018). Konsep dasar dari teori realisme adalah bahwa hubungan internasional merupakan struktur anarki. Anarki merupakan suatu kondisi yang mengklaim bahwa tidak ada kekuasaan tertinggi diatas negara. Bagi kaum neorealisme, struktur anarki dapat menimbulkan ancaman besar bagi suatu negara.

Menurut pandangan kaum neorealisme, struktur dalam hubungan internasional memiliki peran penting yang dapat menjaga kestabilan kepentingan nasional setiap negara. Kaum neorealisme lebih bersikap objektif dan memandang dunia apa adanya bukan memandang dunia yang seharusnya dan sistem anarki merupakan tolak ukur perilaku yang selalu berpatokan pada kepentingan nasional. Sehingga, persaingan dalam suatu negara tetap menjadi hal utama yang tetap dipertahankan neorealis sebagai wujud untuk memenuhi kepentingan nasional. Neorealisme juga percaya bahwa strukturlah yang membentuk perilaku

³ John J. Mearsheimer. "The Tragedy of Great Power Politics". New York. W.W.. Norton & Company. 2001

negara, karena struktur inilah yang menjadi *primary determinant of state-behaviors*, negara lain dan lingkungan di sekitar negara itulah yang akan membentuk perilaku suatu negara.

Menuju pada konteks keuntungan yang dianut oleh kaum neorealis, tidak terlepas pada pandangan realisme yang beranggapan bahwa tujuan negara yang utama adalah untuk mencapai keuntungan yang mutlak. Pada sistem kerjasama yang dianggap oleh kaum neorealis dapat diwujudkan akan tetapi tetap tidak terlepas dari rasa pesimistik terhadap hasil yang akan didapat. Konsep kerjasama yang diterapkan oleh kaum neorealis adalah konsep yang relatif atau *relatif gains*. Hal tersebut berarti bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama akan mendapatkan keuntungan lebih daripada pihak lainnya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak akan dirasa tidak sama rata atau relatif dari sudut pandang yang berbeda.

Negara menurut kaum neorealis, beranggapan bahwa negara dituntut untuk meningkatkan kapabilitas negaranya untuk bertahan dalam kondisi yang anarki. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi yang anarki yang mengharuskan suatu negara dapat bersaing dalam menjaga eksistensi kapabilitas negaranya. Oleh sebab itu, intensi suatu negara menurut pandangan kaum neorealis diasumsikan sebagai persaingan dalam mewujudkan kepentingan nasional. Neorealisme menganggap jika rezim beserta institusi dalam hubungan internasional yang dilatarbelakangi oleh sistem anarki, tidak terlalu memiliki peran yang cukup signifikan dikarenakan bahwa mereka percaya jika kedua aspek tersebut tidak mempunyai *power* yang dominan dalam hubungan negara.

Pendapat Mearsheimer dapat berkorelasi dengan kasus krisis Qatar akibat boikot dan embargo oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Munculnya Qatar sebagai kekuatan baru diantara negara-negara teluk, dapat dilihat sebagai bentuk ancaman. Sebagai contoh Arab Saudi yang telah lama menempati posisi aman sebagai negara paling kuat diantara negara teluk lainnya. Tak terkecuali Amerika Serikat dan Israel sebagai negara adidaya dunia hingga masa kini. Qatar yang dahulunya adalah negara *vassal state* Arab Saudi perlahan bangkit dan mulai mengimbangi beberapa negara *super power* dalam berbagai sektor. Untuk itu Arab Saudi dibawah bayang-bayang Amerika Serikat dan Israel, selaku pemegang tongkat terkuat

negara-negara teluk kemudian membentuk koalisi mengasingkan Qatar untuk melemahkan posisi Qatar.

Teori *Balance of Power*

Realita interaksi negara-negara dalam struktur internasional yang dipandang oleh perspektif realisme, menunjukkan adanya indikasi akan keadaan konfliktual dalam keberlangsungan interaksi atau hubungan dari negara-negara dunia. Dalam hal ini, interaksi yang dilakukan oleh negara-negara dipandang hanya berdasar pada kepentingan dari negara-negara itu sendiri. Oleh karenanya, egoisme yang dimiliki oleh masing-masing negara dapat menyebabkan munculnya konflik apabila terdapat perbedaan atau perselisihan kepentingan .

Dalam pandangan realisme negara dianggap sebagai aktor yang rasional dan akan selalu menetapkan keputusan yang dapat menguntungkan kepentingannya. Sehingga pertentangan yang muncul akibat dari perbedaan kepentingan menyebabkan keadaan konfliktual dianggap sebagai hal yang normatif dalam dinamika struktur internasional. Dalam pengkajian yang lebih lanjut, perspektif realisme menjelaskan bahwa keadaan konfliktual dalam hubungan antar negara, juga didorong dengan realita keadaan anarki dalam struktur internasional. Karena dalam tatanan internasional yang bersifat anarki, tidak adanya suatu otoritas kekuatan diatas negara yang dapat mengatur dan mengontrol keberlangsungan hubungan internasional, sehingga potensi untuk terjadinya konflik tidak dapat dihindarkan.

Dengan keadaan sistem internasional yang anarki, keamanan internasional menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh negara-negara dalam menghadapi ancaman yang kapan saja bisa terjadi. Artinya, tiap negara akan berusaha untuk memaksimalkan kekuatan serta kapabilitas pertahanan mereka agar siap untuk menghadapi kondisi ancaman yang dihasilkan dari struktur anarki internasional. Dalam upaya terciptanya keamanan internasional di tengah keadaan dunia yang anarki, para pengkaji perspektif realisme ataupun neorealisme menawarkan suatu preskripsi dalam mencapai hal tersebut. Yaitu dengan melakukan sebuah mekanisme penyeimbangan kekuatan dalam struktur internasional atau yang disebut dengan *balance of power* (Lebow, 2007).

Balance of power atau perimbangan kekuatan diterangkan oleh Michael Sheehan. Michael Sheehan menjelaskan *balance of power* dalam bukunya yang berjudul “*The Balance of Power: History and Theory*”. Menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud dalam perspektif realisme dan neorealisme diterjemahkan sebagai kapabilitas yang dimiliki oleh negara dalam upaya mencapai tujuan nasional tiap negara. Jika mengkaitkannya kembali dengan struktur internasional yang anarki, maka negara akan berusaha memperoleh kekuatan sebanyak mungkin, dan setelah memperoleh kekuatan tersebut negara akan menggunakan dan mempertahankan kekuatan itu (Sheehan, 1996).

Kekuatan yang dimaksud bukanlah kekuatan yang diperoleh dari sistem pertahanan saja. Sistem pertahanan atau sistem kemiliteran yang dimiliki tiap negara bersifat penting. Terutama dalam berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Sistem internasional yang semakin kompleks, artinya terdiri dari banyaknya aktor dan pastinya juga kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, kekuatan militer memang diperlukan dan bersifat penting. Namun, dalam pandangan ini, kekuatan yang dimaksud tidak hanya bersumber pada sistem pertahanan atau kekuatan militer yang dimiliki setiap negara. Realita yang terjadi adalah sebagai paradigma politik keamanan yang disebut sebagai *security dilemma*. Dimana setiap negara yang berinteraksi dalam sistem internasional memiliki kepentingan dan kekuatan yang berbeda akan bersaing, berdebat, dan berkonflik dalam permasalahan keamanan dan kepentingan nasional.

Dalam penerapannya, *balance of power* membutuhkan keadaan dimana negara-negara memiliki komunitas atau beraliansi. Dimana mereka dapat membangun hubungan serta pandangan yang sama sehingga dapat menentukan mekanisme untuk melakukan penyeimbangan terhadap hegemoni. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan negara-negara akan berbeda dan akan saling bertentangan dalam beraliansi tersebut. Namun sebuah komunitas atau aliansi bersama sangatlah penting dalam upaya mengumpulkan kekuatan bersama apabila tidak ada satupun negara yang memiliki kekuatan serupa dengan hegemoni. Akan tetapi, sasaran terpenting dari hal ini adalah setiap negara dapat menjaga keberlangsungan eksistensi dan kemandirian negara itu sendiri. Dalam hal ini, hubungan yang

dibangun dalam komunitas melalui diplomasi dapat menambah dukungan kekuatan militer sehingga ancaman dapat terminimalisir.

D. Hipotesa

Kebijakan Qatar untuk mengatasi dampak negatif dari embargo 4 negara anggota GCC tahun 2017, adalah :

- Qatar mengoptimalkan media-media terutama Al Jazeera sebagai alat diplomasi *soft power* berhasil meningkatkan citra baik Qatar dimata perpolitikan internasional.
- Qatar memaksimalkan hubungan bilateral yang semakin erat antara Qatar-Iran dan Qatar-Turki berhasil mengurangi dampak negatif. Diantaranya dalam bidang pasokan pangan dalam negeri Qatar, bidang pertahanan berupa kerjasama militer, ladang minyak di *Dukhan Fields*, dan aktivitas ekspor-impor.

E. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini demi menemukan korelasi antara hubungan Qatar dengan 4 negara GCC sehingga Qatar mengalami krisis dan strategi Qatar untuk mengatasi di kawasan regional maupun internasional dengan pandangan dari teori neorealisme dan *balance of power*.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Jatmika, 2016). Pengumpulan informasi dalam metode ini menggunakan fakta-fakta

dari data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, situs web, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs web, dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun yang terdiri dari 5 bab dengan sistematika :

- Bab 1 berisi tentang pendahuluan dari keseluruhan skripsi. Terdiri dari penjelasan-penjelasan yang terbagi dalam beberapa sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 berisi tentang dinamika politik luar negeri Qatar sebelum krisis diplomasi. Pada bab ini penulis berusaha menerangkan keadaan Qatar baik domestik ataupun politik luar negeri Qatar sebelum adanya blokade dari 4 negara Teluk, atau yang disebut pihak media sebagai Krisis Qatar. Rentan waktu yang dipilih kebanyakan sebelum tahun 2014. Selain itu, penulis juga berusaha menjelaskan profil geografis, demografis, dan ekonomi Qatar dan *Gulf Cooperation Council*.
- Bab 3 berisi tentang pemboikatan dari 4 negara teluk sehingga terjadi krisis diplomasi. Pada bab ini penulis berusaha menerangkan dampak negatif dari adanya aksi blokade dari 4 negara teluk terhadap Qatar, dan rentan waktu yang dipilih kebanyakan dari tahun 2014 hingga 2017. Penulis juga menambahkan penjelasan mengenai putusnya hubungan diplomatik Qatar

dengan 4 negara tetangga kawasan, Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok terorisme dan lini masa krisis diplomasi Qatar tahun 2017.

- Bab 4 berisi tentang strategi Qatar mengatasi krisis diplomasi tahun 2017. Pada bab ini penulis berusaha menerangkan cara Qatar mengatasi aksi blokade 4 negara yang notabenenya adalah negara tetangga Qatar sendiri. Penulisan pada bab ini berkaitan dengan teori neorealisme yang menyatakan bahwa *power* adalah akumulasi dari seluruh aspek dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Dan teori *balance of power* yang menyatakan tiap negara yang melakukan interaksi internasional yang anarki, akan membentuk aliansi atau kerjasama guna menyeimbangkan kekuatan negara-negara yang sudah pasti berbeda. Pada bab IV terdiri dari 2 sub-bab, yaitu kebijakan Qatar untuk mengoptimalkan peran Al Jazeera sebagai alat diplomasi *soft power* Qatar dan memaksimalkan hubungan kerjasama Qatar dengan negara Iran dan Turki untuk mengatasi dampak negatif dari pemblokadean terhadap Qatar.
- Bab 5 berisi tentang kesimpulan.